

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pemerintah Provinsi Papua Tengah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Tengah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) yang dimekarkan dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif guna mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah Nabire, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Mimika.

VISI DAN MISI

BPKAD Provinsi Papua Tengah beroperasi mendukung visi makro pembangunan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi. Misi utama badan ini meliputi:

- Mewujudkan perencanaan dan penganggaran daerah yang proporsional, berwujud nyata, dan berbasis kinerja.
- Meningkatkan kualitas penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah guna mencapai opini audit terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara tertib, berkepastian hukum, dan memiliki nilai manfaat ekonomi tinggi bagi daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BPKAD mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan penunjang yang menjadi kewenangan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pertanggungjawaban, serta manajemen aset daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKAD menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi melalui sistem informasi pemerintah daerah.
3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
4. Pembinaan teknis pengelolaan keuangan kepada instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten di wilayah cakupan Provinsi Papua Tengah.

Fokus Utama DOB Papua Tengah: Sebagai provinsi baru, tantangan terbesar BPKAD adalah sinkronisasi pengalihan aset personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dari kabupaten induk dan Provinsi Papua, serta implementasi penuh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pemerintah Provinsi Papua Tengah

STRUKTUR ORGANISASI (GARIS BESAR)

Untuk menjalankan fungsinya secara efektif, struktur BPKAD Provinsi Papua Tengah dirancang secara dinamis, terdiri atas:

- **Kepala Badan:** Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD.
- **Sekretariat:** Menyelenggarakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan internal, program, dan hubungan masyarakat.
- **Bidang Anggaran:** Mengelola proses penyusunan KUA-PPAS, nota keuangan, hingga penetapan dokumen APBD dan APBD Perubahan.
- **Bidang Perbendaharaan Daerah:** Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), mengelola kas daerah, serta menguji penerbitan SPM dan SP2D.
- **Bidang Akuntansi dan Pelaporan:** Menyusun laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan arus kas, serta mempersiapkan dokumen pemeriksaan eksternal.
- **Bidang Aset dan Barang Milik Daerah (BMD):** Melakukan inventarisasi, legalisasi, penilaian, serta pengamanan seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak milik Pemprov.

ALOKASI WILAYAH KOORDINASI PEMBINAAN

BPKAD Provinsi Papua Tengah melakukan asistensi dan pengawasan keuangan daerah terhadap 8 (delapan) pemerintah kabupaten di bawah naungannya:

No	Nama Kabupaten	Pusat Pemerintahan
1	Kabupaten Nabire (Ibu Kota Provinsi)	Nabire
2	Kabupaten Mimika	Timika
3	Kabupaten Paniai	Enarotali
4	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5	Kabupaten Deiyai	Tigi
6	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa

7	Kabupaten Puncak	Ilaga
8	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

STRATEGI AKUNTABILITAS

Dalam rangka percepatan pembangunan fisik dan non-fisik, BPKAD menerapkan strategi pengelolaan kas yang responsif, penyaluran Dana Otsus (Otonomi Khusus) yang tepat sasaran, serta penguatan pengawasan internal bersama Inspektorat Daerah agar setiap rupiah APBD berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan kemajuan masyarakat Papua Tengah.